

## **PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SUKA GERUNDI KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU**

Oleh:  
**Remus Triono**<sup>1\*</sup>  
NIM. E1012151034

**Dr. Isdairi, M. AB**<sup>2\*</sup> **Dr. Ir. Ida Rochmawati, M. Si**<sup>2\*</sup>  
*Email: remustriono@studentuntan.com*

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perencanaan pembangunan di Desa Suka Gerundi tahun anggaran 2018. Permasalahan yang terjadi yaitu pembangunan fisik di Dusun Tantang. S belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan perencanaan belum partisipatif yaitu usulan masyarakat kurang diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Skripsi ini menggunakan teori Adisasmita perencanaan pembangunan dari bawah pendekatan partisipatif yang mencakup dua hal yaitu penentuan prioritas program pembangunan dan partisipasi masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif jenis penelitian deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di dusun Tantang. S desa Suka Gerundi ditinjau dari teori Adisasmita, kebutuhan masyarakat belum terpenuhi (Pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan internet masih terkendala yaitu pada jangkauan jaringan, rehabilitas jalan Perintis di dusun Tantang. S masih belum sepenuhnya terlaksana dan pembangunan Barau di dusun Tantang. S belum optimal). Perbedaan pernyataan antara kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat menunjukan bahwa pengambilan keputusan rencana pembangunan belum berdasarkan kesepakatan bersama. Perencanaan sudah dilakukan secara partisipatif, tetapi partisipasi masyarakat kurang dimanfaatkan dengan baik, yaitu usulan-usulan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan tidak dijadikan sebagai prioritas pembangunan desa karena keterbatasan masyarakat dalam penetapan rencana.

**Kata kunci: Perencanaan Pembangunan, Pembangunan Fisik, Desa Suka Gerundi**

**DEVELOPMENT PLANNING IN SUKA GERUNDI VILLAGE, PARINDU  
SUB-DISTRICT, SANGGAU REGENCY**

By:

**Remus Triono<sup>1\*</sup>**

NIM. E1012151034

**Dr. Isdairi, M. AB<sup>2\*</sup> Dr.Ir. Rochmawati, M.Si<sup>2\*</sup>**

*Email: remustriono@student.untan.ac.id*

1. Student of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, TanjungPura University, Pontianak
2. Lecturer of Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, TanjungPura University, Pontianak

**ABSTRACT**

This research aims to describe and analyze the form of development planning in SukaGerundi Village in the 2018 fiscal year. The problem that occurred is physical development in Tantang.S hamlet that has not been fully implemented and the planning that has not been participatory, namely community proposals that are not considered in decision making. This thesis uses Adisasmita's theory of development planning from under a participatory approach which covers two things, namely determining the priority of development programs and community participation. This research uses qualitative method with descriptive research type through observation, interviews, and documentation. Based on the research results in Tantang.S hamlet of SukaGerundi village, the community needs have not been fulfilled (utilization and maintenance of internet networks are still constrained, namely the network coverage, the rehabilitation of Perintis street in Tantang.S hamlet that has not been implemented and the sub-optimal development of Barau in Tantang.S) in terms of Adisasmita's theory. The difference in statements among the village head, village officials, BPD, and the community indicates that decision making on development planning has not been based on mutual agreement. The planning has been implemented in a participatory manner, but community participation has not been put to good use, in which community proposals according to needs are not prioritized for village development due to community limitations in setting plans.

**Keywords: Development Planning, Physical Development, SukaGerundi Village**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Perencanaan sebagai bagian dalam pengelolaan merupakan langkah awal yang penting dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai kepentingan masyarakat. Perencanaan yang baik dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu masyarakat, BPD, dan pemerintah desa dalam merumuskan program kerja apa saja yang akan dilakukan dengan menyesuaikan dana, masalah dan kebutuhan di lingkungan masyarakat, lemahnya perencanaan dapat berpotensi pada tidak terwujudnya tujuan dari pembangunan desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Perencanaan pembangunan dulunya menggunakan sistem *top-down* yaitu perencanaan secara terpusat, dimana masyarakat ditempatkan sebagai objek pembangunan, seluruh kontrol terkait pembangunan desa ditentukan oleh pemerintah pusat, dari kebijakan, strategi dan target pembangunan ditetapkan secara terpusat, mengakibatkan

pembangunan desa tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa. Kegagalan sistem ini kemudian diganti dengan *bottom-up planning*, yang merupakan perencanaan yang dilakukan secara partisipatif dimana masyarakat diberikan wewenang untuk menentukan arah pembangunan melalui penyusunan rencana hingga pengambilan keputusan sehingga model perencanaan ini dianggap lebih baik dari perencanaan terpusat karena hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa (Nurman 2015: 264).

Perencanaan partisipatif dalam prakteknya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam rapat perencanaan penentuan kegiatan pembangunan atau tingkat partisipasi masyarakat cukup baik namun pembangunan hanya direncanakan oleh pemerintah desa, atau pembangunan hanya untuk memenuhi prosedur semata tanpa menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kendala-kendala lain. Dengan demikian diperlukan

pemahaman lebih lanjut terkait pentingnya perencanaan pembangunan dari bawah ini agar tujuan pembangunan dapat terwujud.

Berdasarkan data yang diperoleh, total pendapatan desa Suka Gerundi tahun anggaran 2018 sebesar Rp765,450,000 (tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) anggaran yang digunakan dalam bidang penyelenggaraan pembangunan desa sebesar Rp 660,040,000 (enam ratus enam puluh juta empat puluh ribu rupiah). Anggaran tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya karena adanya dana desa, sehingga rencana program pembangunan yang diusulkan juga bertambah, manfaat dari pembangunan dapat dilihat dari kegunaannya bagi masyarakat.

Berdasarkan Permendes No 5 tahun 2015 yang mengatur tentang penggunaan dana desa, disebutkan bahwa prioritas pembangunan desa adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar (meliputi kesehatan desa dan polindes; pembinaan dan pengelolaan PAUD), pembangunan sarana dan prasarana desa (pembangunan jalan desa dan jalan

usaha tani; air bersih; irigasi; sanitasi lingkungan), pengembangan potensi lokal (pendirian dan pengembangan BUMDes; pembangunan pasar desa), pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (hutan milik desa; pengelolaan sampah), pemberdayaan masyarakat desa (peningkatan kualitas proses perencanaan desa; mendukung kegiatan perekonomian masyarakat desa).

Sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut, dari data program kerja pada bidang pembangunan desa di desa Suka Gerundi tahun 2018, pembangunan fisik di desa Suka Gerundi sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik namun ada beberapa pembangunan fisik yang belum terlaksana dengan baik khususnya di dusun Tantang.S yaitu: 1) pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan internet masih berkendala yaitu pada jangkauan jaringan yang disebabkan kurang tinggi atau tidak pasnya penempatan tower triangle sehingga jaringan internet mengalami kendala dan menjadi penghambat bagi kebutuhan pekerjaan di kantor desa, 2)

rehabilitas jalan Perintis di dusun Tantang.S masih belum sepenuhnya terlaksana, jalan ini merupakan akses untuk menuju pemakaman serta usaha tani masyarakat sehingga sangat perlu dikedepankan pengerjaannya, dan 3) pembangunan baru di dusun Tantang.S belum optimal, pengerjaannya tidaklah memuaskan dalam artian perbandingan material-materialnya yang digunakan tidak sesuai dan tidak akan tahan lama sehingga pembangunan baru sia-sia. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan pembangunan dalam penentuan prioritas yang terukur yaitu sesuai besar kecilnya kebutuhan masyarakat karena dana yang tersedia terbatas sedangkan program pembangunan banyak, seperti yang diatur dalam peraturan tersebut. Perencanaan pembangunan tidak hanya dilakukan untuk memenuhi prosedur, namun sebagai upaya untuk menghasilkan rencana yang dapat mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut. Pemerintah desa, BPD dan masyarakat harus menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku agar

penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan baik khususnya dalam perencanaan program pembangunan fisik.

Berdasarkan Undang-Undang dasar No 6 tahun 2014, perencanaan seharusnya dilakukan secara partisipatif dan transparan yaitu melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa dan masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan. Perencanaan dilakukan melalui musrembangdes yang melibatkan pemerintah desa, BPD dan masyarakat sebagai perencana program pembangunan yang hasilnya berupa RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) sebagai dasar dalam penyusunan APBDes. Nyatanya perencanaan pembangunan belum partisipatif, usulan masyarakat kurang diperhatikan dalam penentuan program pembangunan.

Aspirasi masyarakat kurang diperhatikan dalam penentuan program pembangunan dimana beberapa usulan yang disampaikan hanya ditampung dan program yang direncanakan berbeda dengan hasil

yang terjadi dikarenakan pengerjaannya kurang antusias. Masyarakat dan BPD belum mampu berkoordinasi dengan baik, penentuan program pembangunan belum berdasarkan kesepakatan bersama, adanya perbedaan pendapat yang seharusnya mampu diselesaikan melalui musyawarah dengan prinsip partisipatif. Partisipasi masyarakat menjadi penting karena masyarakat yang paling tahu kebutuhannya, perencanaan partisipatif menentukan pembangunan yang tepat sasaran agar anggaran dapat digunakan dengan efisien dan lebih efektif dari segi hasil. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, penulis menjadi tertarik melakukan penelitian tentang Perencanaan Pembangunan di desa Suka Gerundi Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau.

## **2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian diperlukan untuk membatasi permasalahan agar penelitian lebih terarah dan sasaran penelitian semakin jelas, maka penulis memfokuskan masalah penelitian ini dalam perencanaan

pembangunan fisik tahun anggaran 2018 di dusun Tantang.S desa Suka Gerundi Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dari segi aspek penentuan prioritas program pembangunan dan partisipasi masyarakat.

## **3. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan penjabaran pada latar belakang masalah, selanjutnya dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana perencanaan pembangunan fisik tahun anggaran 2018 di dusun Tantang.S desa Suka Gerundi Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dari segi aspek penentuan prioritas program pembangunan dan partisipasi masyarakat?

## **4. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan pembangunan fisik tahun anggaran 2018 di desa Suka Gerundi Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dari segi aspek penentuan prioritas program pembangunan dan partisipasi masyarakat.

## **5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu Administrasi Publik, khususnya kajian administrasi pembangunan dan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk meneliti permasalahan yang sama atau berkaitan dengan penelitian ini.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi desa, khususnya desa Suka Gerundi dan Kabupaten Sanggau dalam pembangunan fisik.

### **B. KAJIAN TEORI DAN METODOLOGI**

#### **1. Kajian Teori**

Administrasi pembangunan lebih menekankan pada pengkajian aspek-aspek yang mempengaruhi administrasi pembangunan biaya, perencanaan pengawasan, koordinasi pelaksanaan pembangunan, partisipasi, dan strategi

pembangunan. Nurman (2015:161) mengungkapkan perencanaan pembangunan yang ideal adalah perencanaan pembangunan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah, yaitu dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Adapun yang perlu dilakukan dalam perencanaan pembangunan dari bawah menurut Adisasmita (2006:34) adalah:

1. Penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan, penentuan prioritas program pembangunan harus dilakukan berdasarkan kriteria yang terukur.
2. Didukung oleh partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi program pembangunan tersebut.

Adisasmita (2006:39) menjelaskan, dengan partisipasi masyarakat maka perencanaan pembangunan menjadi lebih terarah artinya program pembangunan yang disusun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penentuan prioritas yang terukur

yaitu urutan berdasar besar kecilnya tingkat kepentingan/kebutuhan masyarakat, karena dana yang tersedia terbatas sedangkan program pembangunan banyak, sehingga perlu ditentukan prioritas pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat.

*Bottom-up planning* (dalam Nurman 2015: 264) yaitu perencanaan dari bawah yang dimaksudkan adalah proses penyusunan rencana pembangunan desa harus memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat:

1. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program kepala desa terpilih;
2. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan desa;
3. Memperhatikan hasil dari proses penyusunan usulan kegiatan masyarakat.

Menurut Wahjudin (dalam Nurman, 2015: 251), partisipasi

merupakan suatu proses pelibatan orang lain terutama masyarakat untuk merumuskan masalah dan mencari solusi secara bersama.

Perencanaan program pembangunan dilakukan melalui musrenbangdes yang merupakan wadah atau penyelenggaraan demokrasi dalam lingkup desa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam penentuan arah pembangunan desa. Musrenbangdes merupakan musyawarah atau pertemuan antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam Musrenbangdes akan disepakati RKPD terkait program/kegiatan yang ingin dilaksanakan yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes. Menurut Histiraludin (dalam Himang, 2015: 378), musyawarah desa atau kampung merupakan

forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang demokratis dengan berbasis masyarakat desa untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tahun 2014, tentang pedoman pembangunan desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Lebih lanjut dijelaskan, pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong-royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Perencanaan pembangunan

diselenggarakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) oleh BPD bersama Kepala Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah masyarakat desa perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) untuk jangka waktu enam tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk jangka waktu satu tahun.

RPJMDes dan RKPDDes ditetapkan dalam peraturan Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dengan demikian perencanaan pembangunan merupakan langkah penting sebagai dasar dalam penyusunan anggaran untuk ditetapkan dalam peraturan desa.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan deskripsi atau

gambaran secara rinci tentang fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan perencanaan pembangunan fisik tahun anggaran 2018 di dusun Tantang.S desa Suka Gerundi Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau maka penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif dilakukan karena penelitian ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif yaitu dengan mengungkap situasi sosial tertentu dengan menggambarkan atau menjelaskan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data (wawancara, observasi atau pengamatan dan dokumen) yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (Satori dan Komariah 2011: 25).

Untuk membuktikan data dalam penelitian ini valid dan kredibel, diperlukan teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi. Menurut Moleong (2004: 326) teknik triangulasi adalah teknik

pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data yang kita peroleh dengan data lain tentang hal yang sama untuk keperluan pengecekan tentang keabsahan data.

Sugiyono (2011: 330) mengartikan triangulasi sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Berikut bentuk triangulasi menurut Sugiyono yang digunakan peneliti dalam mengecek keabsahan data:

1. Triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dari sumber yang sama.
2. Triangulasi sumber yaitu peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perencanaan Pembangunan dari Bawah Berdasarkan Penentuan Prioritas**

Berikut pernyataan Kepala Desa Suka Gerundi terkait kebutuhan pembangunan yang belum terpenuhi:

“Kalau masalah pembangunan barau, pemeliharaan jaringan internet dan rehabilitas jalan Perintis memang masyarakat di dusun Tantang.S membutuhkan namun karena kekurangan dana pada waktu itu jadi rencananya akan diajukan program pembangunan tahun anggaran 2018. Untuk pemberdayaan, kemarin untuk menganggarkan pembangunan itu kita tidak mencukupi karena keterbatasan dana tetapi kita memang mengalokasikan dana untuk bantuan kepada pengurus-pengurus di posyandu misalnya untuk pembalian makanan tambahan balita, untuk keperluan-keperluan kesehatan itu kita bantu kepada posyandu.”

Kemudian Beliau menjelaskan:

“Pembangunan itukan ada porsinya, kita menjalankan berdasarkan intruksi adanya porsi 70/30 itu yang kita gunakan dan kita bagi sesuai kebutuhan dusun masing-masing dan itu memang kemarin pernah diusulkan pembangunan barau, rehabilitas jalan Perintis, dan pemeliharaan jaringa internet itu kita tampung, karena masalah biaya dan pengerjaannya tidak sesuai target maka pembangunan tersebut belum terlaksana”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, memang banyaknya kebutuhan harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan atau anggaran yang tersedia, dalam mengatasi hal ini kepala desa sebagai

fasilitator harus bersikap pro-aktif dengan mendengarkan pendapat dan keluhan masyarakat terkait kondisi desa, dari informasi tersebut pemerintah desa dapat melihat apa yang diperlukan oleh masyarakat desa dengan demikian kepala desa mampu menyasiasi keterbatasan dana. Makna pembangunan bukan hanya sekedar dalam bentuk fisik semata yang penting adalah apa manfaat dari pembangunan itu sendiri bagi lingkungan masyarakat.

Tanggapan ketua BPD terkait kebutuhan masyarakat:

“Masalah pemeliharaan jaringan internet memang terkendala pada jangkauan jaringan sehingga tidak dapat diakses, kalau masalah barau Balai Dusun Tantang.S itukan masih digunakan juga sebagai posyandu jadi pembangunan barau sangatlah penting dan rehabilitas jalan Perintis yang menggunakan anggaran DD tidak lah cukup sehingga tidak menjadi ketergantungan kepada desa karena ada beberapa kebun kelapa sawit disekitar itu, maka dituntut pula partisipasi dari masyarakat tersebut.

Berdasarkan penelitian kondisi di desa Suka Gerundi yang memerlukan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan internet masih

berkendala yaitu pada jangkauan jaringan, rehabilitas jalan Perintis di dusun Tantang.S masih belum sepenuhnya terlaksana dan pembangunan barau di dusun Tantang.S belum optimal. Diperlukan upaya dari pemerintah desa untuk mampu mendampingi dan mengarahkan program pembangunan yang sesuai kebutuhan tersebut dengan keterbatasan anggaran yang tersedia pemerintah desa beserta masyarakat mampu fokus terhadap masalah penentuan prioritas pembangunan.

Hasil penelitian di lapangan, masyarakat sudah mampu menentukan kebutuhannya dan masyarakat turut berperan aktif dalam perencanaan pembangunan, tidak terjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam penyusunan rencana dimana seharusnya seluruh pemangku kepentingan harus terlibat aktif dalam mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, kurangnya pendekatan dari kepala desa terhadap masyarakat dimana seharusnya kepala desa bersikap pro-

aktif dengan mendengarkan pendapat dan keluhan masyarakat terkait kondisi desa, dari informasi tersebut pemerintah desa dapat melihat apa yang diperlukan oleh masyarakat desa dengan demikian kepala desa mampu meniasati keterbatasan dana.

Sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat belum dapat diwujudkan dalam membuat kesepakatan, karena masing-masing pemangku kepentingan mempunyai pendapat berbeda yang belum mencapai titik temu, musrembangdes sebagai wadah partisipasi masyarakat harus dimanfaatkan dengan baik dalam menampung aspirasi masyarakat, pemerintah desa sebagai pendamping masyarakat harus mengutamakan usulan masyarakat dengan pedoman pada peraturan perundangan yang mengatur tentang prioritas pembangunan desa dan menyaring usulan masyarakat dengan memilih usulan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa.

Perencanaan pembangunan tidak hanya dilakukan untuk memenuhi prosedur, namun sebagi

upaya untuk menghasilkan rencana yang dapat mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut Pemerintah desa, BPD dan masyarakat harus menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku agar penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan baik khususnya dalam perencanaan program pembangunan fisik.

## **2. Perencanaan Pembangunan dari Bawah Melalui Partisipasi Masyarakat**

Melalui proses perencanaan akan diketahui sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program pembangunan di desa Suka Gerundi, berikut wawancara bersama Kepala Desa pada 20 Januari 2020

“Jadi begini, kemaren saya selaku Kepala Desa mengintruksikan kepada seluruh Kepala Dusun untuk melaksanakan musdus dalam musdus itu akan diangkat rencana anggaran pembangunan di tahun 2018 dan dari pertemuan tersebut digali beberapa pemikiran dari masyarakat untuk menentukan titik-titik pembangunan dan ternyata setelah mereka mengadakan pertemuan rembuk diantara dusun kemaren terjadilah rencana pembangunan yang kita

bangun disetiap dusunnya masing-masing itu kita angkat ke musdus baru kita angkat ke musrembang Kecamatan.”

Berdasarkan hasil wawancara, musdus adalah musyawarah pertama antara masyarakat, ketua RT dan kepala dusun, setelah itu diangkat ke musrembangdes hingga ke tingkat Kecamatan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa desa sudah menjalankan perencanaan pembangunan fisik sesuai prosedur. Selanjutnya wawancara bersama ketua BPD pada 20 Januari 2020:

“Segala pembangunan fisik pemerintah memang harus dilakukan dari bawah, yaitu dari tingkat masyarakat. Jadi jelas masyarakat harus ikut partisipasi dalam perencanaan mulai dari tingkat RT masuk ke dusun baru diajukan kepada pemerintah desa melalui musrenbang itu kumpulan daripada kepala desa, kepala dusun, tingkat RT. BPD tinggal menanya kembali apakah sudah betul ini rencana bersama atau rencana kelompok dalam tanda petik bukan kepentingan per individu sementara hal inikan untuk kepentingan orang banyak, maka saya tanya balik dan berdasarkan suara bulat bersama anggota dengan melihat dan menilai baru saya ketok palu jadilah istilahnya keputusan akhrit di desa lalu diajukan ke Kecamatan baru ke Kabupaten, ini pengajuan tingkat

akhir, Kabupaten akan menilai apa-apa nanti jangka pendek jangka panjang yang mereka akan ketok palu”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat dilibatkan dan berperan aktif mulai dari musdus hingga musrenbangdes dalam perencanaan pembangunan desa, BPD sebagai wakil masyarakat harus bertindak adil atau tidak memihak dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam mengambil tindakan dan menyetujui rencana pembangunan hingga menjadi keputusan akhir. Berdasarkan penelitian, aspirasi masyarakat kurang diperhatikan dalam penentuan program dimana beberapa usulan yang disampaikan hanya ditampung dan program yang direncanakan berbeda dengan hasil yang terjadi dikarenakan proses pengerjaannya kurang antusias artinya, pembangunan fisik tidak berjalan dengan baik. Masyarakat dan BPD belum mampu berkoordinasi dengan baik, penentuan program pembangunan belum berdasarkan kesepakatan bersama, adanya perbedaan pendapat

dari kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat yang seharusnya mampu diselesaikan melalui musyawarah dengan prinsip partisipatif yaitu masyarakatlah yang harus diutamakan.

Perencanaan partisipatif tidak hanya dilakukan sesuai prosedur, yang terpenting adalah melihat dampak perencanaan pembangunan bagi masyarakat, seluruh pemangku kepentingan perlu menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pemerintah desa sudah seharusnya menerima saran dan usulan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan fisik, seluruh pemangku kepentingan harus menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik.

## **D. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di desa Suka Gerundi, kurangnya sinegritas antara kepala desa, perangkat desa, BPD, dan

masyarakat yang tidak satu kesatuan dalam menentukan rencana program pembangunan. Dapat dilihat dari kurang terjalannya kerjasama dan komunikasi yang baik antara kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat dalam menjalankan tugas dan perannya mengakibatkan partisipasi masyarakat menjadi kurang berarti, padahal masyarakat sudah ada kemauannya dan kemampuan dalam menentukan kebutuhannya. Keikutsertaan masyarakat baik itu dalam mengikuti musdus dan musrenbangdes dapat dikatakan hampir baik, adapun halangan karena kesibukan karena mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah petani.

Masalah tersebut mempengaruhi penentuan prioritas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan, yaitu:

1. Penentuan prioritas program belum sesuai dengan yang ingin dilaksanakan terlihat dari 11 pembangunan fisik yang ada di desa Suka Gerundi tahun 2018, tiga pembangunan belum

terlaksanakan dengan baik yaitu: Pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan internet masih berkendala yaitu pada jangkauan jaringan, rehabilitas jalan Perintis di dusun Tantang.S masih belum sepenuhnya terlaksana, dan pembangunan Barau di dusun Tantang.S belum optimal. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam rencana pembangunan fisik belum berdasarkan kesepakatan bersama. Pengelolaan dana juga sangat penting karena bisa memperkirakan apa saja yang menjadi target utama sehingga pembangunan fisik yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik maupun sesuai target yang hendak dicapai.

2. Perencanaan sudah dilakukan secara partisipatif, tetapi partisipasi masyarakat kurang dimanfaatkan dengan baik, yaitu usulan-usulan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan tidak dijadikan sebagai prioritas pembangunan desa karena keterbatasan masyarakat dalam penetapan rencana.

## 2. Saran

Berikut saran yang dapat peneliti sampaikan terkait masalah yang diteliti:

1. Mengkaji kebutuhan masyarakat dengan melihat kondisi dan permasalahan yang ada di desa kemudian menyesuaikan dana/anggaran yang tersedia, menjalin kerjasama yang baik dengan saling berdiskusi, menyatukan pendapat dan usulan, pemerintah desa harus bersikap pro-aktif agar mengetahui harapan-harapan masyarakat dalam pembangunan.
2. Mengutamakan partisipasi masyarakat dalam menyusun rencana dan pengambilan keputusan agar proses perencanaan partisipatif tidak hanya sebagai formalitas saja namun sebagai wadah untuk menampung usulan-usulan masyarakat dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa melalui musyawarah bersama seluruh pemangku kepentingan guna mendapatkan rencana yang

berdasarkan kesepakatan semua pihak.

3. Pemerintah Desa sesekali harus dapat memberikan pengarahan tentang betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Pengarahan ini diharapkan agar masyarakat desa Suka Gerundi lebih antusias untuk ikut ambil bagian dalam tiap proses perencanaan pembangunan desa.

## 3. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan permasalahan utama, tujuan dilakukannya penelitian, kajian secara teoritis, sistematika dalam penulisan, teknik pengumpulan data yang digunakan serta teknis analisis data yang dilakukan untuk berusaha menjawab berbagai permasalahan dalam penelitian dan lain sebagainya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa isi dari pada skripsi ini tidak sempurna sehingga pembaca yang kritis akan mengetahui berbagai kelemahan dan kekurangannya karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis. Dengan adanya keterbatasan penelitian ini diharapkan dapat disempurnakan

oleh penelitian yang lainnya.

Kendala yang peneliti alami selama berlangsungnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada saat melakukan wawancara pemerintahan desa maupun masyarakat masih ada yang kurang terbuka dan tidak ingin diwawancara.
2. Peneliti kesulitan mendapatkan data yang lengkap, karena datanya tidak satukan dalam file yang sama. Hal ini menyebabkan data yang peneliti peroleh masih terbatas dan belum mampu menjawab secara terperinci tujuan dari penelitian ini.

Walaupun begitu, penulis tetap berharap agar skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan sebagai referensi dalam pembuatan karya ilmiah lainnya. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu yang tidak bisa di sebut satu persatu, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- , 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afiffudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Madekhan. 2007. *Orang Desa: Anak Tiri Perubahan*. Malang: Averroes Press.
- Arif, Syaiful. 2006. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*. Malang: Averroes Press.
- Hikmat, R. Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humanioral Utama Press.
- Kessa, Wahjudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Mardikanto, Totok, Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, lexy. 2004. *Metode Penelittian Kualitatif*.

- Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nasehudin, Toto Syatori, Nanang Gozali. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rosyadi, Slamet. 2010. *Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soetomo, 2009. *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2011. *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- , 2011. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan KUantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Peraturan Perundangan:  
 Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa.  
 Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa  
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.  
 Permendes Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Dokumen:  
 Agus Harto Wibowo. 2009. Tesis: *Analisis Perencanaan Partisipatif (Studi Kasus di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang)*. Program Magister Ilmu

- Administrasi Universitas  
Diponegoro Semarang.
- Fathurrahman Fadil. 2013.  
*Partisipasi Masyarakat*  
dalam *Musyawarah*  
*Perencanaan Pembnagunan*  
*di Kelurahan Kotabaru*  
*Tengah.* Program  
Magister Ilmu Pemerintah  
Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Lambung  
Mangkurat Banjarmasin.
- Rujukan Elektronik:
- Agus, Triady, November 2013.  
*Pengertian Partisipasi*  
*Masyarakat.* Diambil Pada  
tanggal 6 Juli 2019 dari <http://www.Sosiatristudyclub.com>
- Braydenkamma, 23 April 2016.  
Diambil pada tanggal 7 Juli  
2019 dari  
<https://mudahmurahbagus.wordpress.com/2016/04/23/pengertian-sinergi-adalah-membangun-dan-memastikan-hubungan/>
- Chandra, Andy, Februari 2015.  
*Pemkab Segera Cairkan*  
*Dana ADD.* Diambil pada  
tanggal 20 Juni 2019 dari  
<http://Humas.Ketapang.go.id>
- Himang, Anastasius Moris. 2015.  
*Perencanaan Partisipatif*  
*dalam Musrenbang Kempung*  
*(studi Perbandingan di*  
*Kampung Laham dan*  
*Kampung Danum Paroy*  
*Kecamatan Laham*  
*Kabupaten Mahakam Ulu).*  
Diambil pada tanggal 20 Juni  
2019 dari <http://ejournal.pin.or.id>
- Islami, Iqbal. Diambil pada tanggal  
27 Juni 2019 dari  
[www.bppk.depkeu.go.id/.../617](http://www.bppk.depkeu.go.id/.../617)  
Sinergi dan Organisasi  
Kuantum...
- Siregar, I. 2001. Tesis:  
*Penanggulangan Kemiskinan*  
*Melalui Pemberdayaan*  
*Masyarakat Nelayan.*  
Universitas Indonesia Depok.  
Diambil pada tanggal 27 Juni  
2019 dari  
<http://repository.usu.ac.id>
- Wibowo, Agus Harto. 2009. Tesis:  
*Analisis Perencanaan*  
*Partisipatif.* Diambil pada  
tanggal 30 Juli 2019 dari  
<http://eprints.undip.ac.id>